

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam mekanisme operasional produk yang dilakukan oleh pihak BTN Syariah KCP Indramayu jika untuk sebuah produk penghimpunan dan ada penyaluran dana dimulai dari bagian customer service dengan memilih produk tabungan mudharabah yaitu BTN PRIMA IB, BTN HAJI DAN UMROH IB, BTN qurabn ib, dan BTN Emas Ib. untuk membuka buku rekening dari salah satu produk tabungan mudharabah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu nasabah yang berusia 17 tahun maka harus memiliki KTP dan NPWP jika nasabah belum berusia 17 tahun maka dengan akta kelahiran atau kartu pelajar. Untuk setoran awal dalam menabung disetiap produk tabungan yaitu sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000 dan untuk penyetoran uangnya dibagikan teller service. Jika dari produk penyaluran dana yaitu produk modal kerja dimulai dari bagian financing service, bagian ini mengatur jalannya penyaluran dana yang salah satunya produk modal kerja, mekanisme dalam produk ini ada beberapa persyaratan yaitu dari segi nasabah harus punya KTP dan NPWP dan dari segi usahanya harus mempunyai dokumen legalitas usaha seperti akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP, dan izin khusus usaha. Dan juga calon nasabah harus membawa sebuah agunan yang legal.
2. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah pada produk mudharabah yang berada di BTN Syariah KCP indramayu dalam penerapannya belkum sesuai dengan fatwa, dilihat dari segi orang yang berakad, shighot, modal dan pembagian nisbah dikarenakan dalam factor pihak yang menganggung kerugian adalah pihak shahibul maal tetapi dalam pelaksanaannya di BTN Syariah KCP Indramayu pihak yang menanggung kerugainnya adalah pihak mudharib. Tetapi produk produk penyaluran dana yaitu modal kerja ib

menurut peneliti belum sesuai dengan fatwa dikarenakan dalam fatwa sebuah modal itu tidak boleh dalam bentuk piutang, dalam hal ini didalam mekanisme operasional modal harus dalam piutang dengan adanya sebuah jaminan atau agunan yang diperlukan pada saat akad tersebut, jika dilihat dari segi Undang- Undang nomor 21 tahun 2008 dalam hal ini sebuah bank harus memiliki prinsip kehati hatian dengan itu setiap bank yang mengeluarkan adana untuk nasab harus mempunyai barang yang didapat dijadikan jaminan.

3. Dampak dari sebuah Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabahterhadap pelayanan produk bagi sebuah produk di BTN Syariah KCP Indramayu sangat berdampak dikarenakanm BTN Syariah KCP Indramayu adalah sebuah bank yang berprinsip pada 82endid syariah maka produk yang dikeluarkan dari BTN Syariah KCP Indramayu harus sesuai dengan fatawa tersebut. Dengan hal ini produk-produk yang dikelauarkan oleh bank selain dikeluarkannya sesuai dengan kebutuha masyarakat sekitar tetapi juga harus berprinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan data dan informassi diatas maka peneliti hendak memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BTN Syariah KCP Indramayu harus lebih mempromosikan dan mengenalkan produk tabungan mudharabah terkhusus pada produk tabungan emas dan tabungan qurban, karena masyarakat saat ini hanya tahu bnetuk tabungan biasa seperti BTN PRIMA dan BTN Haji Dan Umroh. Contoh pihak bank bisa melakukan dengan cara membrikatahu atau menwarkan ke nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening bank bisa mempromosikan produk tersebut ke nasabah.
2. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu sebaiknya lebih menekankan pemahaman kepada pihak nasabah tabungan mudharabah tentang bentuk nisbah secara detail yang akan didapat, supaya nasabha

mengerti perbedaan anatar menabung dibank syariah dan menabung di bank konvensional.

3. Kepada masyarakat diharapkan untuk memulai melakukan sebuah investasi secara syariah salah satunya dengan cara investasi emas, dalam hal ini investasi emas sangat dianjurkan dikarenakan harga emas semakin tahun semakin tinggi dan bermanfaat untuk memnuhi kebutuhan pendidikan, ibadah, dan untuk pembelian asset lainnya.

